

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Pada hakekatnya setiap masyarakat selalu mengalami perubahan sepanjang sejarahnya. Menurut Hatten dan Rosenthal (2001) perubahan adalah satu hal yang konstan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, perubahan yang terus menerus tersebut tidaklah identik secara materil dalam masa dan kebudayaan yang berbeda melainkan selalu erat tergantung pada kenyataan sosio-kultural yang khusus (Sanderson, 1993). Perubahan masyarakat dipengaruhi antara lain oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan memiliki pengaruh yang bisa menjalar ke seluruh aspek kehidupan. Perubahan masyarakat sebagai sebuah kemajuan seharusnya tumbuh bersamaan dengan kemampuan untuk menghindari degradasi martabat kemanusiaan. Akan tetapi, perubahan masyarakat juga ditandai dengan meningkatnya gejala dehumanisasi, depersonalisasi, frustrasi, sikap apatis, konflik dan kesenjangan antargenerasi. Dengan demikian, perubahan sosial sebagai salah satu dimensi perubahan masyarakat global, mengandung relasi dengan kondisi sosial atau kecenderungan-kecenderungan dinamis masalah-masalah sosial budaya. (Kammeyer *et al*, 1992; Suwarsono, 2000).

Globalisasi sebagai suatu kondisi sosial telah mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat, sistem sosial, termasuk nilai-nilai esoterik dan sosial, sikap serta pola tingkah laku antarkelompok dalam masyarakat (Toffler, 1970; Soekanto, 1996; Giddens, 2001; Keith, 2001). Dimensi keyakinan dan nilai-nilai sosial dalam pandangan humanisme merupakan bagian dari naluri esensial manusia sebagai makhluk sosial sebagai upaya pembangunan kebudayaan masyarakat pada setiap masa.

Berbagai kelompok masyarakat telah mengembangkan beragam upaya untuk mentransmisikan aspek-aspek mendasar sistem keyakinan, nilai dan perilaku kepada generasi mudanya agar mereka kelak menjadi anggota masyarakat yang berkeadilan dan beradab sehingga keberlangsungan masyarakat tersebut dapat dijaga (Sanderson, 1993: 47). Capra (1998) menegaskan bahwa salah satu hal mendasar yang harus diupayakan oleh masyarakat dalam membangun kembali kebudayaannya di abad ke-21 ini harus difokuskan kepada usaha memperkecil kekerasan, kekacauan, dan gangguan-gangguan lain yang muncul pada masa-masa perubahan sosial.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus menerus tersebut menuntut adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan jaman tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat seperti itu diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas hidup dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang pendidikan .

Pendidikan yang ideal pada hakekatnya selalu diarahkan pada upaya pembangunan masyarakat masa depan yang mengikuti alur yang benar-benar berkemanusiaan (humanistik) yang menekankan pada perkembangan potensi khas setiap orang sebagai makhluk manusia (O'Neil 2002: 466). Selain itu, pendidikan bisa dimaknai sebagai wahana sosialisasi individu yang intensif ke dalam nilai dan aspirasi masyarakat, negara dan dunia yang rasional dan moderen (Kammeyer, Ritzer dan Yetman, 1985: 158). Oleh karena itu, pendidikan sebagai institusi sosial dan juga sebagai wahana sosialisasi memiliki peranan strategis bagi upaya perencanaan dan berlangsungnya proses humanisasi (Tilaar,2000; Sumaatmadja,2002; Tuhuleley, 2003).

Dengan demikian, pendidikan sesungguhnya memiliki dua makna yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Pendidikan bukan saja mempersiapkan seseorang untuk memasuki masa depan yang mungkin memunculkan nilai-nilai baru, tapi juga harus beranjak dari berlakunya nilai-nilai lama sebagai penjelmaan kesejarahan (*historicity*) yang memungkinkan terpeliharanya kesinambungan antar generasi dalam masyarakat sebagai pendukung budaya (*culture bearers*) (Hasan (1995). Melalui pendidikan, potensi peserta didik bisa dikembangkan dalam wujud *power-with* kekuatan bersama atau daya *carrying society*, yaitu membangun solidaritas suatu komunitas persaudaraan yang memperhatikan kepentingan semua pihak atas dasar komitmen pada tujuan dan pengertian yang sama. *Power-within* dikembangkan untuk menggali potensi spiritual dimana harga diri manusia dan penghargaan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai yang mengalir dari martabat tersebut dapat tumbuh secara manusiawi (Sastrapratedja 2003). Dengan kata lain, pendidikan dilihat dari sisi sebagai bagian dari ikhtiar manusiawi harus dipandang sebagai upaya pemberdayaan manusia yang menuju ke arah pengembangan *human dignity* yaitu harkat dan martabat manusia atau *humanizing human* atau memanusiakkan manusia (Mastuhu, 2003).

Pendidikan yang ideal bagi bangsa Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; serta secara aktif mengembangkan kapasitas siswa untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berakar pada nilai-nilai

agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Berdasarkan kajian terhadap pemikiran tersebut, pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana harus mampu mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif menjadi model suatu masyarakat (Havigurst and Neugarten, 1966: 307; Pai, 1990: 38). Sekolah merupakan wahana transmisi dan transformasi nilai-nilai sosial dan perilaku (Pai, 1990: 38). Berdasarkan pemikiran tersebut maka sekolah seyogyanya memberi peluang kepada para peserta didik untuk pengenalan dan analisis nilai-nilai, perilaku dan prakiraan-prakiraan dasar yang menggarisbawahi isu-isu sosial, dan memeragakan kepedulian terhadap apa yang dipelajari di dalam kelas kepada kegiatan-kegiatan yang memiliki makna penting dalam kehidupan sehari-hari (O'Neil, 2001: 475).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah adalah mata pelajaran yang diberikan di sekolah dan dirancang sebagai wahana dan alat untuk mengarahkan, membimbing dan membantu peserta didik untuk mengembangkan jati diri sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia yang memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global melalui pencapaian pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa depan (Depdiknas, 2004).

Idealnya, Pendidikan IPS sebagai wahana pengembangan kesadaran nilai-nilai menurut Jarolimek (1986) maupun Savage dan Armstrong (1996) harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengenali nilai-nilai dan moral serta peluang untuk tumbuhnya keinginan dan kesadaran mengatasi perilaku yang membahayakan integritas nilai kemanusiaan dalam kehidupan bangsa maupun kehidupan sesama warga

dunia, dalam kehidupan mereka sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, serta mendapat peluang dan diijinkan untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dan moral. Dengan kata lain, pembelajaran IPS haruslah memberi peluang yang besar bagi berlangsungnya proses membangun kemampuan personal, perkembangan emosional, kemahiran interpersonal dan sosial, kesadaran sosial dan moral. Pendidikan IPS juga harus dapat membangun dan mengamalkan nilai-nilai hidup yang baik, membina prinsip, pengamalan dan falsafah hidup berlandaskan nilai-nilai luhur bagi pembentukan insan yang seimbang, stabil, rasional, berwibawa, bertimbang rasa, berdedikasi dan bertanggungjawab serta mempunyai keyakinan dan kekuatan diri dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Pada hakekatnya perubahan atau kondisi dan situasi yang belum biasa dalam pandangan para penganut teori Chaos (*a vision of the world*) seperti yang diungkapkan oleh Hayles *et al* (1991) dimaknai sebagai suatu proses akhir dari suatu kondisi krisis atau kondisi yang penuh dengan ketidakmenentuan dan ketidakteraturan (*absence of order*). Lebih lanjut dikatakan bahwa dibalik kondisi yang serba tidak teratur dan tidak bisa diperkirakan tersebut sesungguhnya ada hukum keberaturan, yakni bahwa krisis akan membawa kepada sesuatu yang baru. Briggs dan Peat (1999) memaknai krisis sebagai suatu situasi yang mengandung nilai kebijakan dalam mensikapi kehidupan. Dia menambalikan bahwa dalam krisis tumbuh sikap kreatif, kesadaran saling ketergantungan dan keterhubungan, sikap adaptif, kemampuan melihat makna dibalik fakta, kesadaran akan tujuan penciptaan alam semesta dengan segala isinya oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, kesadaran makna waktu dalam kehidupan, dan kesadaran akan keberadaan diri di tengah alam semesta sebagai satu kesatuan yang utuh.

Perubahan sosial dalam bentuk krisis multidimensi seringkali melahirkan berbagai kondisi paradox yang ironis dan sulit diperkirakan dalam masyarakat. Salah

satu paradoks ironis yang ditemukan oleh Naisbit (1994) dalam pengamatannya antara lain adalah di satu sisi di beberapa tempat kekerasan bisa didinginkan atau diatasi melalui penerapan sanksi internasional, sementara di tempat lainnya terus berkobar tanpa terkendali. Lebih lanjut dikatakan bahwa abad ke-21 ditandai dengan banyaknya ledakan kekerasan yang didorong oleh perselisihan etnik, agama, budaya atau kawasan (*territorial disputes*). Pendapat tersebut juga didukung oleh Dalai Lama (1999: 20-27) yang mengatakan bahwa abad ke-21 ini adalah abad krisis kemanusiaan yang ditandai dengan meningkatnya kekerasan dan merebaknya pertikaian yang berujung peperangan.

Gambaran dunia beserta tatanan sosial tersebut merupakan konsekuensi dari proses modernisasi yang dilandasi oleh pemikiran yang diinspirasi oleh kaum *Cartesian* dan *Newtonian*, yang dikokohkan oleh gerakan Pencerahan (*enlightenment/ Aufklärung*), dimana ilmu pengetahuan dan anak emasnya teknologi dan kapitalisme mendominasi kehidupan umat manusia (Capra, 1998). Kenyataan tersebut telah melahirkan berbagai konsekuensi buruk bagi kehidupan manusia dan alam pada umumnya yang nampak pada beberapa aspek berikut. *Pertama*, pandangan dualistik yang telah menyebabkan objektivisasi alam secara berlebihan dan pengurusan yang semena-mena yang berujung pada krisis ekologi (Gilbert, 1996; Sumaatmadja, 1996). *Kedua*, pandangan moderen yang bersifat objektivistis dan positivistis akhirnya cenderung menjadikan manusia seolah objek, dan masyarakat pun direkayasa bagai mesin. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak manusiawi (Sumaatmadja, 2002; Keith, 2001; Tillman, 2004). *Ketiga*, dalam modernisme ilmu-ilmu positif-empiris, apabila kenyataan kebenaran tak lagi ditemukan dalam religi bagi sebagian orang, maka materilah yang mudah dianggap sebagai kenyataan mendasar. Hidup pun menjadi

keinginan yang tak habis-habisnya untuk memiliki dan mengontrol hal-hal yang bersifat material. Dalam kondisi seperti ini aturan main utama adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Etika persaingan dalam mengontrol sumber material inilah yang merupakan pola perilaku dominan individu dan bangsa. Akibatnya adalah bahwa nilai – nilai moral dan religi kehilangan wibawanya (Madjid, 1992; Giddens, 2001; Loomans and Loomans, 2003; Fortuna *et al*, 2005).

Hancurnya rasa kemanusiaan dan terkikismya semangat religius, serta kaburnya nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya jadi diri budaya bangsa merupakan kekhawatiran manusia paling klimaks dalam kancah pergulatan global. Alhasil, timbulah disorientasi moral-religius, yang pada gilirannya mengakibatkan pula meningkatnya kekerasan, keterasingan, depresi mental dan bangkitnya tribalisme atau mentalitas yang mengunggulkan suku atau kelompok sendiri (Toeffler,1992; Miall, Ramsbotham dan Woodhouse, 2000; Fortuna *et al*,2005).

Sejarah perjalanan umat manusia selalu mengandung kecenderungan untuk menghancurkan unsur kemanusiaannya. Kecenderungan semacam itu tampaknya sudah inheren dalam struktur kejadian manusia. Menurut Colombijn (dalam Fortuna, 2005) praktik budaya kekerasan adalah fenomena yang tak terpisahkan dari historisitas umat manusia. Sejarawan hanya bisa berspekulasi bahwa di belakang gejala konflik tersebut tentu ada suatu hikmah (*wisdom*) yang tersembunyi. Sekalipun konflik antarsuku, etnik, bangsa dan negara merupakan bagian dari perjalanan sejarah, tetapi hikmah di dalamnya mengajarkan bahwa perbedaan suku bukan untuk berseteru, tetapi untuk saling mengenal, saling memberi dan menerima. Kompetisi antarsuku seharusnya dilihat sebagai upaya menegakkan kebajikan, bukan untuk menunjukkan keadidaya. Pluralisme sebagai fakta sejarah harusnya diakui sebagai sesuatu yang harus dihormati.

Adapun yang harus dirisaukan adalah bukan karena pluralismenya, tapi cara-cara seseorang atau suatu kelompok untuk memaksa orang lain atau kelompok lain agar seperti dirinya atau kelompoknya (Miall, Ramsbotham and Woodhouse: 2000).

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dalam sambutan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2005 mengatakan bahwa kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia menyukai kekerasan dalam memecahkan masalah merupakan kenyataan pahit yang harus dialami oleh bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia tahun-tahun akhir pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 adalah masa-masa penuh kekerasan, perkelahian antarsuku, desa, kampung, rukun tetangga dan perkelahian tawuran antar pelajar. Peristiwa meletusnya bom yang berkekuatan besar di Legian Bali dan beberapa tempat lainnya menggambarkan bahwa kekerasan telah menjadi bagian yang melekat pada tradisi pemecahan masalah sebagian dari bangsa Indonesia, dan hal itu telah memperburuk citra bangsa di dunia internasional.

Merebaknya tindakan kekerasan di Indonesia dewasa ini bisa disaksikan setiap hari melalui media massa atau secara langsung dialami oleh masyarakat. Pertikaian etnik yang bersimbah darah di Kalimantan Tengah (Kompas, 20 Pebruari 2000) telah melukai wajah kemanusiaan. Banyak korban jatuh baik etnis Dayak maupun Madura (Kivimaki, 2005). Kerusuhan yang mengakibatkan korban manusia baik yang meninggal maupun yang terluka di kedua belah pihak tidaklah sedikit. Demikian pula tawuran antar desa di Indramayu antara tahun 2000 hingga 2001 memakan korban manusia, harta benda yang tidak sedikit. Hingga tahun 2005 terus terjadi berbagai kerusuhan di Ambon dan Poso (Malik, 2005) yang menyebabkan banyak korban manusia. Belum lagi dari media televisi akhir-akhir ini kita disuguhi tayangan tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan kelompok tertentu. Berbagai bentuk kekerasan

tersebut menjadi tayangan sehari-hari di media televisi maupun tulisan di surat kabar. Fenomena kekerasan dan keberingasan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dewasa ini tampaknya semakin berkembang dan ironisnya semakin menampakkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan rutin sehari-hari.

Kenyataan-kenyataan tersebut bisa dijadikan petunjuk adanya kecenderungan merosotnya penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk perilaku empatik dan kasih sayang menjadi hal yang sulit ditemukan dalam perilaku masyarakat. Kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan tersebut semakin kabur seiring dengan semakin rendahnya kepedulian manusia terhadap manusia lainnya. Wiriaatmadja (2002: 169) menyatakan bahwa meningkatnya kekerasan merupakan petunjuk bahwa orang-orang kehilangan pegangan akan norma yang selama ini dipegangnya dengan kuat sehingga hal itu telah mengakibatkan proses dehumanisasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang mestinya menjadi landasan dasar dalam kehidupan bermasyarakat telah tereduksi.

Kenyataan tersebut semakin menggiring pada perenungan penulis bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti kedamaian, toleransi, empati, kasih sayang, tanggung jawab, kerjasama, kerendahan hati, kejujuran, kesederhanaan, kebebasan dan persatuan sulit mendapat tempat yang mulia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lemahnya kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dalam rendahnya sikap empatik dalam masyarakat merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti khususnya dan para pendidik umumnya untuk melakukan berbagai upaya agar mampu mempersiapkan warga negara global yang bebas dari segala prasangka rasial, agama dan merendahkan latar belakang sejarah bangsa lainnya.

Sebagai warga masyarakat dunia, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk berupaya menemukan pemecahan masalah tersebut. Upaya yang harus ditempuh oleh

bangsa adalah mempromosikan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam manifestasi sikap dan perilaku empatik di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa. Menurut Maarif (Tuhulele, 2003: 4) upaya tersebut akan memerlukan waktu yang tidak singkat dan sederhana untuk dimasukkan ke dalam gelombang kesadaran bersama. Sekalipun demikian, kita semua memiliki kewajiban untuk menyelamatkan peradaban yang bersendikan keadilan, persamaan dan persaudaraan. Segala bentuk prasangka yang memicu permusuhan dan kekerasan harus direduksi karena tidak layak bagi kemanusiaan.

Komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dapat dikembangkan melalui pengembangan sikap empatik di sekolah. Tawuran antar pelajar antarsekolah di beberapa daerah memperjelas lagi wajah generasi muda bangsa yang suka kekerasan. Sikap tidak suka terhadap perdamaian, toleransi yang diabaikan, empati yang rendah serta penegasian terhadap rasa kasih sayang diantara siswa yang terlibat tawuran, menjadi indikator rendahnya penghargaan mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tidak sedikit korban manusia jatuh dan tentu saja kondisi tersebut membuat kita merasa prihatin dengan perilaku mereka. Pada masa Ujian Nasional tahun 2006 lalu kita disuguhi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap salah seorang siswanya di Cilegon. Padahal, guru seharusnya menjadi suri teladan bagi para siswanya dalam mereka mengembangkan sikap positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terjadinya tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh para peserta didik maupun guru tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan komitmen dan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dan rendahnya empati di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai institusi sosial yang seharusnya menjadi tempat generasi muda membangun komitmen dan mengembangkan sikap dan perilaku empatik belum menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

Proses pembelajaran di sekolah yang selama ini dikembangkan terlalu mementingkan aspek intelektual pada level rendah dan mengabaikan pengembangan aspek hati nurani dalam pengenalan diri dan budi pekerti peserta didik dalam kehidupan sosialnya. Pengalienasian peserta didik terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi jati dirinya dan juga jati diri orang lain dalam proses pembelajaran sangat lemah, dan hal itu telah menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya mereka menjadi manusia egois, mengabaikan kepentingan orang lain dan memaksakan kehendak yang kesemuanya itu merupakan kondisi dasar bagi timbulnya tindakan kekerasan.

Tugas bagi pengembangan nilai-nilai sebagai dasar sikap dan perilaku empatik seharusnya dilakukan oleh setiap mata pelajaran, tidak hanya merupakan garapan yang dibebankan kepada pendidikan moral. Akan tetapi pada kenyataannya mata pelajaran yang dengan jelas memiliki karakter kaya akan muatan nilai dan moral sekalipun seperti mata pelajaran PPKN dan Agama dewasa ini menurut Mulyana (2004: 147) mengalami pergeseran substansi, dan tertinggal hanya sebagai mata pelajaran yang berkonotasi transfer pengetahuan belaka. Mata pelajaran Pendidikan IPS pun yang pada dasarnya memiliki potensi strategis untuk mempromosikan nilai-nilai dan ketrampilan sosial mengalami reduksi dan tertinggal hanya sebagai pengajaran konsep yang tak bermakna bagi kehidupan peserta didik sehari-hari, sehingga ketimpangan antara aspek intelektual dengan emosional pada akhirnya hanya melahirkan peserta didik yang memiliki kepedulian yang rendah terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungannya.

Bentuk-bentuk latihan pengembangan kesadaran nilai dalam bentuk sikap dan perilaku empatik dirasakan masih amat kurang dilakukan di sekolah. Berdasarkan hasil penelitiannya Al Muchtar (1991) ditemukan bahwa Pendidikan IPS masih bersifat kering, tidak mampu mendekatkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan sosial budayanya, serta terlepas dari konteks masalah yang aktual dalam masyarakat,

sehingga Pendidikan IPS tidak mampu berperan sebagai media bagi pengembangan kemampuan penalaran nilai bagi peserta didik. Pendapat senada dikemukakan oleh Sanusi (1998) yang mengatakan bahwa keterkaitan yang seharusnya terjalin antara pembelajaran IPS dengan struktur sistem sosial dan perilaku kemasyarakatan individual, kelompok dan organisasi masih lemah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dari bulan September hingga Desember 2007 terhadap beberapa sekolah dasar di Bandung, ditemukan bahwa para guru belum mengembangkan pembelajaran IPS sebagai wahana bagi pengembangan sikap dan perilaku empatik siswa. Oleh karena itu, para siswa tidak memiliki kesempatan untuk melatih kesadaran mereka akan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun demikian hal positif yang peneliti temukan adalah para guru memiliki antusiasme dan semangat ingin tahu bagaimana mengembangkan pembelajaran IPS sebagai wahana pembelajaran kesadaran nilai kemanusiaan melalui pengembangan sikap dan perilaku empatik siswa.

Menurut Hasan (1996) yang diperkuat oleh Loomans and Loomans (2003), kelemahan dan kesenjangan pembelajaran tersebut lebih didasari oleh adanya kecenderungan mengabaikan aspek nilai yang mampu membangkitkan kesadaran akan makna ilmu-ilmu sosial dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial lebih didominasi oleh hapalan fakta dan diskusi teori yang tidak pernah dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Konsekuensinya adalah peserta didik hanya memperoleh kesempatan yang sangat kecil untuk berlatih di sekolah tentang kesadaran nilai.

Berbagai upaya untuk penyadaran akan pentingnya kebersamaan hidup di planet terus dilakukan. Gerakan global yang mengarah pada upaya tersebut antara lain melalui PBB atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberi harapan bagi sebuah

dunia yang lebih ramah dan adil. Pada bulan Juni 1992 PBB menyelenggarakan pertemuan *Agenda 21: The Earth Summit Strategy to Save Our Planet* di Rio de Janeiro. Tonggak kedua, *Konferensi Hak Azasi Manusia* di Wina tahun 1993, Pertemuan Puncak Dunia untuk Pembangunan Sosial dan Konferensi tentang Perempuan di Beijing dan 1995. Tonggak ketiga, pada tahun 1995 di Paris pada pertemuan para Menteri Pendidikan sedunia yang dimotori oleh PBB (UNESCO) dikeluarkan suatu deklarasi yang menyepakati pentingnya pendidikan untuk perdamaian, hak azasi manusia dan demokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap negara anggota PBB termasuk Indonesia. Langkah tersebut merupakan upaya bagi penghormatan terhadap martabat dan harkat manusia yang harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pendidikan di setiap negara, termasuk Indonesia. Semua tonggak sejarah tersebut adalah bukti dari perhatian umat manusia dalam rangka menciptakan sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaannya dalam hidup bersama di planet bumi ini. Semua upaya tersebut tentu memerlukan waktu yang tidak singkat untuk dimasukkan ke dalam gelombang kesadaran bersama.

Pendidikan dengan pendekatan nilai adalah pendidikan yang berorientasi dan mampu menumbuhkan kesadaran akan perlunya penghormatan terhadap subyektivitas dan relativitas dari dan antar pribadi sebagai profil yang mandiri, terbuka, lentur, fleksibel, toleran dalam konotasi baik, empatik, tegar dan selalu mencari peluang yang tepat dan baik dalam menghadapi setiap perubahan dan guncangan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (Rich, 1971; Delors, 1977; Copp, 2001: 102; Mulyana, 2004). Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan oleh karenanya perlu ditumbuhkembangkan sikap dan perilaku empatik melalui pembelajaran IPS berbasis kesadaran nilai, dan upaya

tersebut menurut Tilman (2004) merupakan salah satu jawaban dari kecemasan terhadap meningkatnya tingkat kekerasan di tengah serba ketidakpastian dewasa ini.

Menurut Al Muchtar (1991), Pendidikan IPS tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu membekali pengetahuan, sikap dan ketrampilan sosial untuk menjalani kehidupan di masyarakat, sehingga dengan demikian mampu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berfikir dan nilai sebagai dasar terbinanya kemampuan belajar mandiri yang berkelanjutan. Hal tersebut diperkuat oleh Hasan (1996) bahwa sebagai suatu wahana pendidikan generasi muda bangsa, pendidikan ilmu-ilmu sosial memiliki misi mengembangkan aspek sikap, nilai dan moral pada peserta didik. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsekuensinya dari pemikiran tersebut adalah pendidikan ilmu-ilmu sosial tidak boleh dilaksanakan dalam suatu proses dan suasana pendidikan yang bebas nilai.

Pendidikan IPS dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah mata pelajaran yang menyajikan seperangkat fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan lingkungannya berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan datang. Fakta, konsep dan generalisasi tersebut berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan ketrampilan sosial dan kewarganegaraan peserta didik agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, salah satu tujuan Pendidikan IPS adalah membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Depdiknas, 2006).

Peneliti dalam kesempatan ini memilih kota Bandung yang diwakili oleh beberapa sekolah pada beberapa kecamatan yang tersebar secara acak sebagai populasi

penelitian. Adapun dasar pertimbangannya adalah bahwa kota tersebut memiliki sekolah yang dapat mewakili karakter umum sekolah-sekolah di Indonesia. Juga peneliti bertempat tinggal di kota tersebut. Berdasarkan analisis kondisi, normatif, historis, empiris dan perspektif maka pentingnya pengembangan kesadaran nilai-nilai kemanusiaan dalam Pendidikan IPS di sekolah dasar di kota Bandung mendapatkan beberapa alasan yang mendasar. Latar belakang tersebut di atas merupakan alasan yang cukup kuat bagi penulis untuk melakukan studi penelitian tentang pengembangan Pendidikan IPS sebagai wahana yang efektif bagi pengembangan sikap dan perilaku empatik peserta didik pada tingkat sekolah dasar.

Rancangan model yang akan dikembangkan pada prinsipnya merupakan alternatif dari berbagai model yang selama ini sudah dikembangkan. Sekalipun demikian, keunggulan model tersebut sifatnya hipotesis. Model yang dirancang dimaksudkan sebagai model konseptual yang akan diuji signifikansinya melalui eksperimen. Studi ini diharapkan menghasilkan temuan empiris dan rekomendasi yang akan membantu pencapaian tujuan Pendidikan IPS.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan berbagai pemikiran tersebut, maka masalah umum penelitian ini adalah *“bagaimana pembelajaran IPS berbasis nilai kemanusiaan untuk mengembangkan kesadaran empatik peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD)?”*

Masalah umum tersebut peneliti kembangkan lebih spesifik dalam rumusan masalah khusus agar penelitian lebih jelas dan tajam arah pelaksanaannya.

Pembelajaran sebagai suatu upaya yang sistematis dengan mempertimbangkan aspek akademis dan psikologis, meliputi langkah-langkah pokok pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Hamalik, 2002: 10). Untuk kepentingan arahan

dan fokus penelitian maka rumusan masalah penelitian pertama adalah *“desain pembelajaran IPS apa yang efektif mengembangkan kesadaran empatik peserta didik kelas 5 SD di kota Bandung ?*

Keberhasilan suatu model pembelajaran dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan. Untuk melihat sejauh mana keampuhan model pembelajaran IPS dimaksud sebagai wahana pengembangan sikap empatik, maka perlu diteliti efektivitasnya. Sebagai arahan dalam penelitian ini maka rumusan masalah ketiga adalah *“apakah ada perbedaan kesadaran empatik yang cukup jelas antara peserta didik kelas 5 di SD kelas eksperimen dengan kelas kontrol.”*

Program pembelajaran IPS sebagai wahana pengembangan sikap empatik peserta didik belum banyak dikembangkan di sekolah dasar di kota Bandung. Dalam upaya mensosialisasikan program tersebut melalui penelitian dan pengembangan pada kesempatan ini para guru menghadapi berbagai kendala teknis, akademis dan psikologis. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian tentang kendala-kendala yang dihadapi, maka sebagai arahan dirumuskan masalah penelitian yang keempat dengan pertanyaan berikut, *“kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru SD dalam mengembangkan pembelajaran IPS untuk pengembangan kesadaran empatik peserta didik kelas 5 SD di kota Bandung?*

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan atau mengembangkan program pembelajaran IPS sebagai wahana bagi pengembangan sikap empatik peserta didik kelas 5 SD di kota Bandung. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan desain program pelaksanaan pembelajaran IPS sebagai wahana pengembangan nilai empatik peserta didik kelas 5 pada tingkat SD di kota Bandung.

2. Menguji efektivitas program pembelajaran IPS sebagai wahana pengembangan nilai empatik peserta didik kelas 5 pada tingkat SD di kota Bandung.
3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh guru kelas 5 SD dalam mengembangkan pembelajaran IPS sebagai wahana pengembangan nilai sikap empatik peserta didik di kota Bandung.

1.4. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini secara konseptual adalah bahwa program pembelajaran IPS di SD adalah suatu pengajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk mengarahkan, membimbing dan membantu peserta didik menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif dan kreatif, serta memiliki rasa kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan dengan memperhatikan potensi dan perkembangan anak yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral (Banks and Clegg,1985; Skeel, 1995; Diknas, 2006).

Tiga aspek mendasar yang menjadi pilar pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah karakter perkembangan anak, model-model pembelajaran dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai objek kajian utamanya. Pembelajaran IPS menurut penelitian Al Muchtar (2004) memiliki potensi sebagai wahana pembelajaran nilai. Berbagai model pembelajaran dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pembelajaran IPS di kelas. Model-model tersebut antara lain model ekspositori, inkuiri, demonstrasi, advokasi, konsederasi, klarifikasi nilai, analisis nilai, aksi sosial dan model terpadu. Berdasarkan pertimbangan dari sudut manfaat dan efektifitas model, pada penelitian dan pengembangan ini peneliti akan menggunakan perpaduan antara model *Schutz* dan *Brown (The Awareness Training)* dengan model *Mc Phail (The Consideration Model)*, dengan dasar pertimbangan untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran

(Joice and Weill, 1980; Cleaf, 1991; Brophy and Alleman, 1996; Hamalik, 1998; Nasution, 1999).

Pembelajaran IPS di SD juga memperhatikan aspek psikologis anak, tepatnya perkembangan anak dalam berbagai dimensi baik dimensi intelektual, kepribadian dan moral (Papalia, Diane E and Sally W. Olds, 1992 ; Hurlock, E.B, 1992; Monks, F.J, et al, 1994, Whitebread, 2000). Untuk kepentingan pengembangan pembelajaran, peneliti memfokuskan pada interaksi antara ranah kognitif dan afektif secara terpadu (Krathwohl, Bloom dan Masia, 1964).

Aspek lain yang menjadi karakter pembelajaran IPS adalah muatan yang kental dengan dimensi nilai kemanusiaan (*humaneness*). Objek kajian pembelajaran IPS dalam penelitian ini adalah sikap empatik sebagai sikap prinsipil dan terurai yang penuh dengan nilai-nilai (*value ladden*) yang menempatkan manusia di pusat perhatian, sekaligus sebagai titik tolak penilaian tentang kehidupan masyarakat yang baik. Nilai inti yang menjadi dasar sikap empatik adalah kemanusiaan yang harus dihormati dalam martabatnya. Sekalipun demikian, penghormatan terhadap martabat manusia sebagai sikap positif, tidak berarti tidak bersikap positif terhadap pencipta manusia yaitu Allah; berfihak kepada manusia seharusnya tidak berarti berfihak tidak kepada Allah; berfihak kepada Allah seharusnya tidak berarti berfihak tidak pada manusia. Dalam masyarakat tak ada kemungkinan untuk mengembangkan sebuah etos kemanusiaan bersama kecuali atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang tertuang dalam pandangan hidup bangsa yakni Pancasila (Noorsyam, 1988).

Seiring dengan perubahan masyarakat terjadi berbagai anomali dalam kehidupan masyarakat (Sumarjan, 1989), termasuk dalam sikap mental dan motif moral manusianya. Lebih lanjut dikatakan bahwa dehumanisasi, dalam wujud merebaknya

kekerasan merupakan indikator adanya kondisi yang anomi dalam memahami nilai kemanusiaan khususnya dalam pemahaman dan pensikapian terhadap perdamaian, kasih sayang dan toleransi. Sesuatu yang sulit adalah mewujudkan nilai perdamaian, kasih sayang dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari tanpa sikap empatik. Soedjatmoko (1995) telah cukup lama menggagas kemanusiaan dalam konteks perkembangan global dan modernitas, dengan antara lain berharap agama dan pendidikan sebagai pencerah kebudayaan. Persoalan pokok yang berkaitan dengan peningkatan wawasan tersebut adalah sejauh mana kita mampu merumuskan wawasan baru kemanusiaan dengan langkah berikut. Pertama, mendudukan peran agama secara fungsional; kedua, merumuskan kembali strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kemanusiaan ; dan ketiga, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, menempatkan pendidikan sebagai bagian dari upaya pencerahan manusia. Dengan demikian, perlu dikembangkan pendidikan berwawasan kemanusiaan.

Fenomena tindakan kekerasan yang berkembang di ruang publik hingga peperangan, lambat laun menjadi alternatif yang dianggap benar dalam memecahkan masalah perbedaan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap empatik terkalahkan oleh sikap egois, mementingkan diri sendiri serta menjadi tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Pemandulan kesadaran tersebut pada akhirnya akan membutakan mereka terhadap makna hidup dalam kebersamaan. Krisis sikap empatik dan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai kebersamaan sebagai landasan membangun masyarakat yang berperikemanusiaan, berkembang tanpa bisa dikendalikan. Untuk kepentingan mencegah keadaan semakin memburuk itulah perlu dicari strategi bagi pengembangan sikap empatik anak terhadap nilai-nilai kemanusiaan sejak dini, dan dengan pertimbangan tingkat perkembangan maka usia sekolah dasar merupakan tahap yang tepat untuk memulai upaya pencerahan tersebut. Empati sebagai potensi

psikologis baik dalam wujud perilaku sosial (Hurlock, 1992) maupun motif moralitas (Kurtinez dan Gerwitz, 1992), dapat dijadikan pendekatan di dalam mengembangkan kesadaran anak terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pengembangan sikap empatik anak dibimbing dan dilatih agar tumbuh menjadi manusia yang memiliki kemampuan untuk meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman orang lain, dan hal itu merupakan dasar bagi tumbuhnya kasih sayang dan toleransi, serta yang pada akhirnya diharapkan melahirkan sikap suka perdamaian.

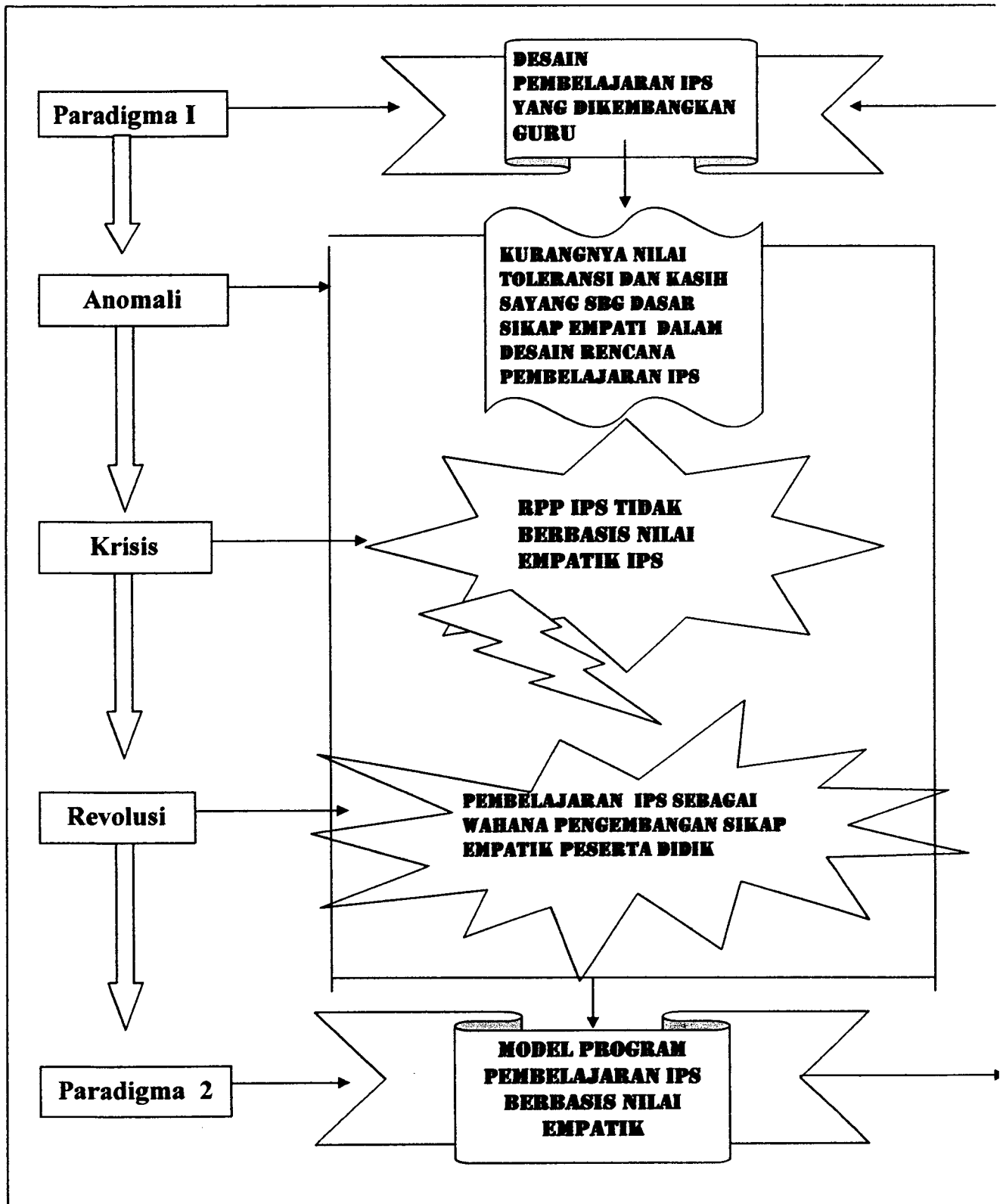
Berdasarkan pemahaman bahwa pendidikan adalah proses sosial budaya (Pai, 1990), maka proses pembelajaran merupakan arena terdepan dalam mengembangkan sikap empatik sebagai bagian integral dari upaya pencerahan atau penyadaran peserta didik akan pentingnya nilai perdamaian, kasih sayang dan toleransi di dalam kehidupan bersama. Pendidikan IPS di SD yang seharusnya kental dengan muatan nilai-nilai kemanusiaan, telah gagal menjalankan peran strategisnya tersebut. Pembelajaran IPS di kelas pada kenyataannya hanya diposisikan sebagai wahana penyampaian informasi belaka, bahkan yang seringkali terjadi informasi tersebut tidak terlalu bermakna bagi para peserta didik di dalam menjalani proses pematangan dan perkembangan sebagai warga negara dan warga dunia yang memiliki sikap empatik dan kesadaran akan pentingnya kehidupan bersama yang penuh damai, kasih sayang dan toleransi. Pembelajaran IPS di SD seharusnya menjadi wahana formal pertama bagi anak menumbuhkan sikap empatik dalam memahami pilar-pilar kehidupan bersama. Upaya untuk memecahkan masalah tersebut harus dimulai dari kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk memiliki komitmen terhadap pentingnya mengembangkan sikap empatik di dalam proses pembelajaran IPS.

Adanya kesadaran dan upaya akan pentingnya pembelajaran IPS sebagai wahana bagi pengembangan sikap empatik sekaligus penguatan kesadaran peserta didik

akan nilai kemanusiaan di dalam kehidupan mereka sehari-hari melahirkan pemikiran baru tentang konsep pembelajaran IPS. Pembelajaran sebagai aktivitas edukatif (Gredler, 1991; Hayes, 2001), memiliki prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai dengan teori belajar yang melandasinya. Prosedur dan langkah-langkah tersebut disusun dalam suatu program perencanaan dan pengembangan pembelajaran IPS. Untuk menemukan model atau desain program perencanaan dan pengembangan pembelajaran yang efektif tersebut itulah penelitian ini dilaksanakan.

Fase terakhir dari paradigma penelitian ini adalah dihasilkannya suatu model program konseptual tentang sistem pembelajaran IPS di SD, sebagai wahana proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam mengembangkan sikap empatik sekaligus sebagai upaya membangun kerangka sikap dasar peserta didik dalam mewujudkan kepedulian akan pentingnya hidup bersama dalam perdamaian yang penuh kasih sayang dan toleransi terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun paradigma penelitian tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar I-1 Paradigma Penelitian

1.5. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan pendekatan multi-metode dengan model *two – phase design* (Creswell, 1994) atau strategi penelitian ganda (Burgess dalam Brannen, 2002). Model *two phase design* pada dasarnya adalah mengkombinasikan dua desain penelitian yaitu mengkombinasikan desain penelitian tindakan (kualitatif-naturalistik) dan desain penelitian kuasi eksperimen (kuantitatif-rasionalistik). Pengkombinasian desain penelitian tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari kecenderungan mengaburkan kompleksitas masalah penelitian dan menghindari pengambilan keputusan yang kurang efektif. Penggunaan model penelitian *two phase design* memiliki implikasi terhadap penentuan subyek, sampel, teknik dan instrumen pengumpulan, penganalisaan dan penafsiran data penelitian. Adapun alur penelitian yang penulis gunakan adalah meliputi 3 langkah utama, yakni 1) studi pendahuluan yang meliputi studi literatur, studi lapangan, dan penyusunan draft awal produk, 2) pengembangan program, dengan PTK, dan 3) uji produk melalui eksperimen.

Alur penelitian, pengembangan dan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Studi Pendahuluan

Tahap ini disebut juga persiapan untuk pengembangan yang ditempuh melalui dua langkah yakni :

- (a) studi kepustakaan
- (b) wawancara
- (c) penyusunan produk awal atau desain program pembelajaran IPS sebagai wahana pengembangan sikap empatik peserta didik.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan baik dari kesimpulan yang bersifat konseptual atau teoritis maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu disusun program pembelajaran yang cocok untuk pengembangan sikap empatik peserta didik. Oleh karena itu, desain program yang akan dikembangkan sudah terarah pada pengembangan program pembelajaran. Draft yang sudah disempurnakan kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Tahap studi pendahuluan melibatkan empat orang guru IPS kelas 5 dari 4 SD negeri dari beberapa kecamatan di kota Bandung melalui wawancara. Sementara pada langkah penyusunan draf awal dilakukan secara kolaborasi intensif berupa penelitian tindakan kelas (PTK) yang melibatkan seorang guru mitra yang mengajar IPS di kelas 5 dan peneliti sendiri .

Teknik pengumpulan data pada tahap pendahuluan adalah studi dokumenter dan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan pada tahap pendahuluan adalah dokumen dan pedoman wawancara yang dirancang khusus untuk penelitian ini, sedangkan analisis data pada tahap pendahuluan bersifat *deskriptif*.

B. Tahap Pengembangan

Tahap ini meliputi langkah pengembangan terbatas dan pengembangan lebih luas. Pengembangan terbatas dan lebih luas akan dilaksanakan dengan ancangan PTK untuk mencari model pembelajaran. Perbedaan dalam pengembangan terbatas dan lebih luas adalah luas cakupan wilayahnya. Pengembangan lebih luas tanpa melibatkan kembali sekolah yang digunakan untuk pengembangan terbatas.

Pada tahap pengembangan, subyek penelitian dalam langkah pengujian terbatas melibatkan seorang guru mitra yang sama ketika penyusunan draft awal program pembelajaran. Kesenambungan kolaborasi dengan mitra yang sama tersebut didasari oleh efektifitas dan kebermaknaan penelitian. Sampel pada tahap pengembangan

terbatas dengan ancangan PTK ditentukan secara *purposif* dengan mempertimbangkan tujuan dan kriteria subyek penelitian.

Pada tahap pengembangan dengan PTK, data dikumpulkan melalui teknik observasi yang bersifat partisipasi-reflektif. Sementara instrumen pada tahap pengembangan adalah sebagai berikut :

- (1) peneliti sebagai instrumen utama yang dilengkapi dengan
- (2) pedoman observasi yang dirancang khusus untuk penelitian ini, dan
- (3) catatan lapangan (catatan reflektif dan catatan pinggir).

Analisis data pada tahap pengembangan bersifat *naratif-reflektif* yang dilakukan sepanjang proses penelitian tindakan secara teliti, ajeg dan benar dengan teknik interpretasi data secara *triangulasi* (Hopkins,1993; Sukmadinata, 2005; Wiriadmadja, 2005).

C. Tahap Pengujian Produk dan Sosialisasi

Pada tahap ini dilaksanakan uji produk dan sosialisasi hasil. Pengujian kemampuan produk berupa program pembelajaran IPS dilakukan dengan menggunakan metode kuasi eksperimen. Dalam pelaksanaan pengujian digunakan kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berpasangan (*matching*). Jumlah dan kategori kelompok eksperimen sebanyak kelompok kontrol. Adapun dasar pertimbangan pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut masing-masing pasangan kelompok dinilai sama atau setara sehingga memenuhi syarat sebagai berpasangan.

Pada tahap uji program atau sosialisasi melibatkan empat sekolah yakni dua SDN dengan dua orang guru, sebagai kelompok eksperimen dan dua sekolah dan dua guru kelompok kontrol. Jumlah sekolah yang terlibat dalam uji program dan sosialisasi

tersebut dianggap representatif baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.

Instrumen penelitian pada tahap uji produk dan sosialisasi adalah tes dengan skala empati (Mueller, 1986; Gazda, 1991). Uji coba instrumen dilaksanakan terhadap instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Uji coba validitas teoritik dilakukan dengan menyusun perangkat dan item – itemnya berdasarkan ciri – ciri variabel penelitian dan indikatornya, serta disusun secara sistematis dan dengan memperhatikan faktor keterbatasan responden, sehingga diharapkan didapat instrumen yang valid secara isi, konstruk dan secara prediktif. Validasi isi dan konstruk juga diupayakan melalui konsultasi dengan ahli yang dipandang memahami penyusunan instrumen dan memahami bidang kajian dalam penelitian ini. Sedangkan uji validitas empirik dilakukan pada dan selama pelaksanaan uji program terbatas hingga tahap uji lebih luas secara *siklus dialektis* di sekolah dimaksud. Uji validitas empirik secara siklus dianggap telah memadai baik dari aspek validitas maupun reliabilitas, sehingga tidak perlu dianalisis secara statistik.

Berdasarkan gambaran kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka desain eksperimen pada uji produk sekaligus sosialisasi yang digunakan adalah “*Posttest Only Control- Group Design* “ (Millan and Schumacher, 2001: 339; Gall, Gall and Borg, 2003: 395).

1.6. Sistematika Disertasi

Sistematika pembahasan dan pelaporan dirancang merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun (2006) dan telah diperbaharui sesuai dengan pedoman tahun 2011. Adapun sistematika dimaksud dapat disimak dalam paparan berikut.

BAB I, memaparkan pendahuluan yang berisi latar belakang atau rasional masalah penelitian dan analisis masalah, esensial, gejala-gejala kesenjangan, kerugian dan keuntungan pentingnya melakukan penelitian pengembangan model program pembelajaran IPS sebagai wahana pengembangan nilai empatik peserta didik kelas 5 di kota Bandung. Selain itu, penulis juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan posisi masalah pembelajaran IPS sebagai wahana pengembangan sikap peserta didik dalam ruang lingkup Pendidikan IPS yang selama ini penulis geluti, yang antara lain dijabarkan dalam rumusan masalah penelitian. Tentu saja sebagai sebuah keharusan, penulis pun melengkapi bab pendahuluan ini dengan tujuan dan paradigma penelitian, serta metode penelitian.

BAB II menyajikan landasan pemikiran dan teori-teori utama serta turunannya yang relevan dengan bidang kajian IPS umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan aspek pembelajaran IPS tingkat SD, perkembangan peserta didik tentang sikap dan perilaku, serta metodologi penelitian dan pengembangan. Pada bab kajian pustaka ini penulis juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan prosedur, subyek dan temuannya. Selain itu, penulis mengajukan posisi teoritik yang berkenaan dengan pembelajaran IPS sebagai wahana pengembangan kesadaran nilai empatik peserta didik di tingkat sekolah dasar. Terakhir, berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan penulis menggambarkan hipotesis penelitian ini.

BAB III menguraikan ancangan metode penelitian dan pengembangan tentang nilai empatik peserta didik dalam pembelajaran IPS di SD yang meliputi komponen pendekatan, lokasi, subyek sampel dan cara pemilihannya, instrumen dan proses pengembangannya, teknik pengumpulan dan analisis data serta prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan akhir disertasi.

BAB IV menyajikan pengolahan atau analisis data yang berhasil dikumpulkan pada proses penelitian dan pengembangan nilai sikap empatik peserta didik dalam pembelajaran IPS dengan prosedur dua fase serta data tentang berbagai kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan sikap empati tersebut di kelasnya. Pada bab ini pun penulis memaparkan hasil dan pembahasan temuan berdasarkan hasil analisis data dikaitkan dengan dasar teoritik yang penulis gunakan.

BAB V menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan tentang pengembangan nilai empatik peserta didik melalui pembelajaran IPS di SD dalam bentuk kesimpulan penelitian. Beranjak dari kesimpulan yang diperoleh, penulis mengajukan uraian implikasi atau rekomendasi kepada para pembuat kebijakan; kepada para pengguna hasil penelitian dan kepada para peneliti ke depan yang berminat melakukan penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, artikel jurnal, sumber-sumber lain dan internet yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan disertasi ini.

Lampiran-lampiran, berisi dokumen-dokumen yang esensial dan relevan yang digunakan dalam penelitian ini, dan terakhir adalah riwayat hidup penulis.